

Kinerja DPRD Kabupaten Tulungagung Dalam Penggunaan Anggaran Reses

Ahmad Baharudin

Magister Manajemen Universitas Islam Kadiri Kediri

email: ahamdbaharudin@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the performance of the Regional House of Representatives (DPRD) of Tulungagung Regency in utilizing the budget during recess activities. The main focus is to assess how well the planning, implementation, and evaluation of the recess budget are conducted in an effective, efficient, and accountable manner. A quantitative approach was employed, using survey methods through questionnaires distributed to respondents consisting of DPRD members, secretariat staff, and community beneficiaries. Data were analyzed using descriptive and inferential statistical techniques. The results indicate that DPRD performance in budget utilization during recess is generally adequate, although challenges remain in terms of transparency, reporting documentation, and community involvement in decision-making processes. This research recommends enhancing the institutional capacity of the DPRD and strengthening the reporting and monitoring systems to optimize the impact of the recess budget on society.

Keywords: DPRD Performance, Budget Utilization, Recess, Accountability, Public Participation

Latar Belakang Teoritis

Pengelolaan keuangan daerah berfungsi sebagai elemen kunci untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memainkan peran penting dalam pengawasan proses perencanaan dan penetapan serta pengawasan anggaran daerah dalam kerangka otonomi daerah (Nyoman et al., 2022). Pemerintahan daerah di Indonesia memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pelayanan publik, yang salah satunya diwujudkan melalui penganggaran daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah memiliki fungsi penganggaran yang krusial dalam memastikan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Dalam konteks ini, masa reses menjadi momentum penting bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan anggaran. DPRD Kabupaten Tulungagung sebagai badan legislatif daerah memegang tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mencapai target yang diinginkan.

Masa reses merupakan waktu di mana anggota DPRD kembali ke daerah pemilihannya untuk bertemu langsung dengan konstituen guna menggali kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat (Hamidin et al.,

2024). Dalam praktiknya, efektivitas reses sering kali menjadi perdebatan, terutama terkait bagaimana hasil reses diintegrasikan dalam proses penganggaran daerah. Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa meskipun kegiatan reses bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan perencanaan anggarannya, implementasinya masih menemui berbagai kendala, seperti rendahnya respons pemerintah daerah serta keterbatasan kapasitas anggota DPRD dalam mengadvokasi aspirasi masyarakat menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh Septariani (2024).

Anggota DPRD menggunakan masa reses sebagai periode kritis untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat (jasmas) melalui interaksi langsung. Menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh Septariani (2024) efektivitas masa reses memainkan peranan penting dalam menentukan standar kebijakan anggaran yang dibuat. Pelaksanaan masa reses di Kabupaten Tulungagung menjadi titik penting untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang harus disertakan dalam anggaran daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis pendekatannya adalah deskriptif. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis dengan menganalisis hubungan antar

variabel menggunakan data numerik dan statistik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berusaha mengukur kinerja DPRD Kabupaten Tulungagung dalam penggunaan anggaran saat menjalankan reses secara objektif dan sistematis.

Desain deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai fenomena yang terjadi. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimanakah DPRD Kabupaten Tulungagung menggunakan anggaran saat reses serta bagaimana efektivitas dan transparansi dalam pengelolaannya. Desain ini memungkinkan penelitian untuk memperoleh data kuantitatif yang dapat diuji secara statistik guna memperoleh kesimpulan yang valid. Menurut Creswell (2014), pendekatan kuantitatif cocok digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menemukan pola atau hubungan antar variabel melalui data yang dapat diukur. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari anggota DPRD dan masyarakat yang berpartisipasi dalam reses guna mengetahui sejauh mana transparansi dan efektivitas anggaran reses DPRD Kabupaten Tulungagung.

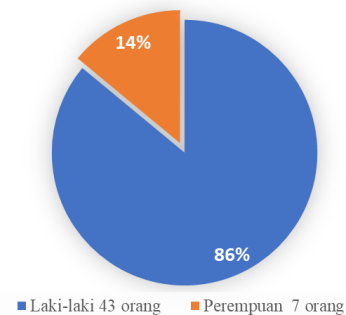
Definisi operasional variabel penelitian ini mencakup hal-hal berikut ini:

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	
Variabel Independen (X)	X ₁	Kualitas Perencanaan Anggaran
	X ₂	Pengawasan Anggaran
	X ₃	Efisiensi Penggunaan Anggaran
	X ₄	Keterlibatan Masyarakat
	X ₅	Transparansi Pengelolaan Anggaran
Variabel Dependen (Y)	Y	Kinerja DPRD Kabupaten Tulungagung dalam Penggunaan Dana Reses
Variabel Penghubung (Mediator; M)	M ₁	Peningkatan Aspirasi Masyarakat
	M ₂	Kualitas Laporan dan Dokumentasi Anggaran
	M ₃	Keputusan Berbasis Data

Sumber: Data olah 2025

Analisis data penelitian yang sudah terkumpul, diolah menggunakan *SPSS for windows* tipe 30. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2024-2029 dan masyarakat yang menjadi peserta reses. Berdasarkan data terbaru dari Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung, jumlah anggota DPRD adalah 50 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu. Sampel penelitian ini mencakup 30% anggota DPRD dari berbagai fraksi dan komisi Pemilihan ini didasarkan pada keterlibatan langsung mereka dalam penggunaan anggaran reses.



Gambar 1. Prosentase Populasi Penelitian

Dalam penelitian, instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data. Sugiyono (2017) mendefinisikan instrumen penelitian sebagai alat untuk mengukur fenomena alam dan sosial yang diamati. Pada penelitian ini instrumen penelitian berupa:

Kuesioner

Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data dari anggota DPRD dan masyarakat mengenai efektivitas penggunaan anggaran reses. Kuesioner disusun berdasarkan indikator yang relevan dengan penelitian, seperti transparansi anggaran, dampak reses terhadap masyarakat, dan akuntabilitas DPRD. Skala Likert digunakan untuk mengukur persepsi responden secara kuantitatif.

Adapun Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengevaluasi keakuratan alat ukur dalam menilai item yang telah disiapkan (Riyanto & Hatmawan, 2020). Uji validitas dinyatakan valid jika signifikansi

$< 0,05$ dan $r\text{-hitung} \geq r\text{-tabel}$ dengan nilai positif.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa item-item dalam kuesioner memiliki keterkaitan internal yang baik serta mampu mengukur variabel yang dimaksud secara andal. Menurut Sugiyono (2022), reliabilitas dapat dicapai apabila hasil pengukuran menunjukkan konsistensi dalam pengulangan, sehingga data yang diperoleh layak untuk dianalisis lebih lanjut. Salah satu teknik yang umum digunakan untuk menguji reliabilitas adalah Cronbach's Alpha, yang mengukur konsistensi internal berdasarkan koefisien antar-item dalam satu skala. Variabel dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$.

2) Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pada penelitian ini uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dari model regresi menyebar secara normal. Uji ini dapat dilakukan dengan dua tahapan; analisis grafik dan pengujian statistik:

- Analisis grafik dilakukan dengan cara melihat grafik P-P Plot dengan ketentuan jika data tersebar yang ditandai oleh titik-titik di sekitar garis diagonal dan arahnya searah dengan garis tersebut, maka pola distribusi dianggap normal yang berarti bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Uji normalitas juga dilakukan dengan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah distribusi residual dari model regresi, jika nilai Sig. $> 0,05$, maka data residual dianggap berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual (gangguan atau error) pada pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lainnya. Heteroskedastisitas dapat menyebabkan hasil estimasi yang tidak efisien dan tidak dapat diandalkan, meskipun

estimasi koefisien tetap tidak bias (Gujarati, 2012). Salah satu metode untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah melalui pengamatan terhadap grafik scatterplot antara residual (SRESID) dengan prediksi hasil regresi (ZPRED). Metode ini adalah dengan melihat scatterplot antara nilai prediksi (X) dan Residual (Y).

c. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu kondisi di mana terdapat hubungan linear yang tinggi antar variabel bebas dalam suatu model regresi berganda, keberadaan multikolinearitas dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak stabil dan standard error menjadi lebih besar, sehingga interpretasi terhadap pengaruh terhadap masing-masing variabel menjadi sulit dilakukan (Kurniawan dan Prasetyo, 2021). Sedangkan Purwanto (2022) berpendapat bahwa, salah satu cara untuk mendeteksi multikolinearitas adalah dengan melihat korelasi antar variabel independent. Jika nilai korelasi adalah lebih dari 0,80, maka patut dicurigai adanya multikolinearitas. Selain itu, analisis juga dapat dibantu dengan melihat nilai standar error yang tinggi atau t-statistik yang rendah secara bersamaan di beberapa variabel independent. Sejalan dengan tersebut, menurut Ghazali (2028), multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai korelasi antar variabel independent serta melihat nilai toleransi *Variance Inflation Factor (VIF)*. Namun, jika VIF dan toleransi tidak tersedia, maka dapat digunakan matriks korelasi antarkovariat. Jika korelasi antara dua variabel independent lebih dari 0,80 atau mendekati 1 atau -1, maka dicurigai adanya multikolinearitas tinggi.

3) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengidentifikasi hubungan linier antara beberapa variabel bebas dengan variabel terikat. Hubungan fungsional antara variabel tersebut dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \epsilon$$

Keterangan:

Y : Variabel terikat

(Penggunaan Anggaran)

a : Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien regresi

X_1 : Variabel bebas X_1

(Kualitas Perencanaan Anggaran))

X_2 : Variabel bebas X_2

(Pengawasan Anggaran)

X_3 : Variabel bebas X_3

(Efisiensi Anggaran)

ϵ : Error atau Tingkat kesalahan

4) Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t atau uji parsial digunakan untuk menilai signifikan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Riyanto & Hatmawan, 2020). Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ atau $sig > 0,05$, maka H_0 diterima.

b. Uji F

Uji F atau uji simultan digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas secara keseluruhan memengaruhi variabel terikat secara bersama (Riyanto & Hatmawan, 2020). Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $sig > 0,05$, maka H_0 diterima

5) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan variasi dalam variabel terikat (Riyanto & Hatmawan, 2020). Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilai R^2 semakin mendekati 1, maka semakin besar kontribusi variabel bebas dalam memprediksi variabel terikat.

Hasil Dan Pembahasan

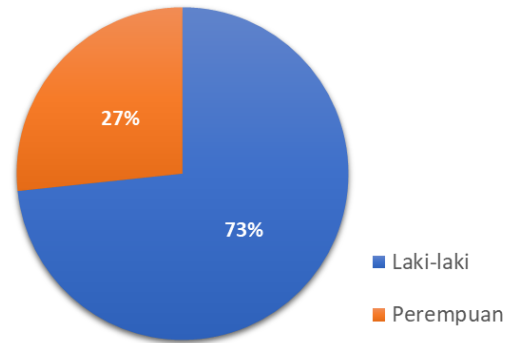
1. Hasil Penelitian

a. Analisis Deskriptif Responden

Pada penelitian ini, anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dilibatkan sebagai responden untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kinerja legislative dalam penggunaan anggaran saat menjalankan reses. Untuk itu, dilakukan analisis deskriptif terhadap karakteristik dasar responden guna memberikan konteks terhadap hasil penelitian. Analisis deskriptif responden juga bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik anggota DPRD Kabupaten Tulungagung yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode purposive sampling, peneliti memilih 15 anggota DPRD yang dianggap memiliki relevansi dan keterlibatan langsung dalam penggunaan anggaran saat menjalankan reses.

Karakteristik yang dianalisis meliputi jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir. Analisis ini penting untuk memahami latar belakang responden yang dapat mempengaruhi persepsi dan Tindakan mereka terkait penggunaan anggaran reses.

Gambar 2. Responden Berdasar Jenis Kelamin

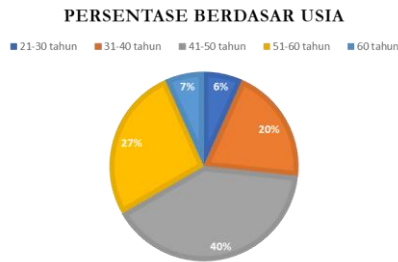


Sumber: Data diolah 2025

Dari 15 orang responden yang dipilih, terdapat 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas anggota DPRD yang terlibat dalam penggunaan anggaran reses adalah laki-laki. Distribusi ini mencerminkan komposisi gender dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2017), pemilihan sampel harus mempertimbangkan proporsi karakteristik populasi untuk meningkatkan representativitas data. Dengan demikian, distribusi gender dalam sampel penelitian ini dianggap representatif.

Rentang usia responden pada penelitian ini berkisar antara 22 tahun hingga 65 tahun. Mayoritas responden berada pada kelompok usia 41-50 tahun, yang menunjukkan bahwa mereka berada dalam usia produktif dan memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang legislative. Distribusi usia penting untuk memahami perspektif dan kebijakan yang diambil oleh anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dalam penggunaan anggaran reses. Menurut Arikunto (2010), usia responden dapat mempengaruhi cara pandang dan pengambilan Keputusan mereka. Oleh karena itu, variasi usia dalam sampel ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Gambar 3. Persentase Responden Berdasarkan Usia



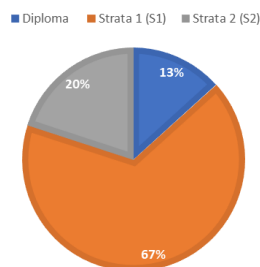
Sumber: Data diolah 2025

Dalam hal pendidikan terakhir, responden memiliki Tingkat Pendidikan yang bervariasi mulai dari Diploma hingga Strata 2 (S2). Sebagian besar responden memiliki Pendidikan Strata 1 (S1), yang menunjukkan bahwa mereka memiliki latar belakang akademik yang memadai untuk memahami dan mengelola anggaran reses. Pendidikan yang lebih tinggi memiliki kontribusi dalam pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan dan pengelolaan anggaran. Menurut Creswell (2014), Tingkat Pendidikan responden dapat mempengaruhi kualitas data yang diperoleh dalam penelitian. Dengan demikian, distribusi pendidikan responden dalam penelitian ini mendukung validitas penelitian.

Dari tabel berikut dapat diketahui bahwa paling banyak responden yang memiliki Pendidikan terakhir adalah Strata 1 (S1) sebanyak 10 orang responden atau 67% dari keseluruhan total responden yang ada, disusul Strata 2 (S2) sebanyak 3 orang responden atau 20% dari keseluruhan responden, dan Diploma pada urutan terakhir ada 2 orang responden atau 13% dari keseluruhan responden.

Gambar 4. Persentase Pendidikan

PERSENTASE BERDASAR PENDIDIKAN

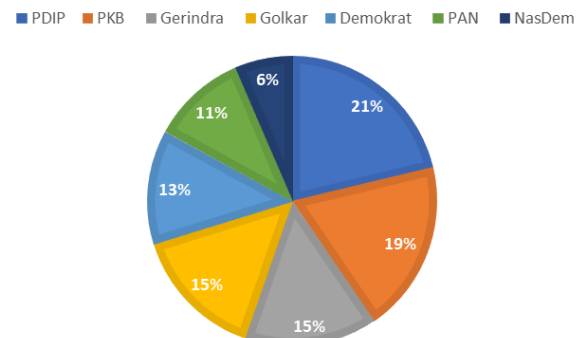


Sumber: Data diolah 2025

Dalam penelitian ini, distribusi responden juga memperhatikan perwakilan fraksi dan komisi DPRD sebagai bagian dari strategi purposive sampling. Hal ini dilakukan agar peneliti memperoleh pandangan yang beragam terkait penggunaan anggaran reses dari masing-masing spektrum politik dan bidang kerja legislative. DPRD Kabupaten Tulungagung terdiri dari beberapa fraksi besar, seperti Fraksi PDIP, Gerindra, PKB, Golkar, dan lainnya. Serta terbagi ke dalam empat komisi: Komisi A (Pemerintahan), Komisi B (Ekonomi), Komisi C (Pembangunan), dan Komisi D (Kesejahteraan Rakyat). Pemilihan responden berdasarkan variasi fungsi dan afiliasi dalam kelembagaan akan memberikan keluasan dan kedalaman informasi untuk mendukung data yang lebih akurat dan menjawab rumusan masalah penelitian (Neuman, 2014).

Gambar 5. Responden Berdasarkan Partai

PERSENTASE BERDASAR PARTAI POLITIK



Sumber: Data diolah 2025

b. Analisis Deskriptif Variabel

Analisis deskriptif variabel penelitian merangkum tanggapan responden dari kuesioner untuk mengukur pengaruh Penggunaan Anggaran (X): Kualitas Perencanaan Anggaran (X1), Pengawasan Anggaran (X2), Efisiensi Penggunaan Anggaran (X3), Keterlibatan Masyarakat (X4), dan Transparansi Pengelolaan Anggaran (X5) terhadap Kinerja DPRD (Y) di DPRD Kabupaten Tulungagung pada saat melakukan reses. Berikut 285 angka hasil uji IBM SPSS Statistics 30.0:

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kualitas Perencanaan Anggaran (X1)

Rata-rata tanggapan oleh responden terhadap perencanaan anggaran reses telah mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan daerah memiliki rata-rata terendah yakni 4,73, dapat disimpulkan bahwa pemahaman anggota DPRD Tulungagung dalam pemahaman prioritas kebutuhan daerah sudah baik, akan tetapi lebih rendah dibandingkan dengan aspek lainnya. Hal ini menunjukkan variasi persepsi anggota DPRD dalam kualitas perencanaan anggaran reses. Hasil temuan ini sejalan dengan konsep *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa perencanaan anggaran yang berkualitas harus memenuhi prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dominasi respons positif dalam penelitian ini mengkonfirmasi penerapan prinsip-prinsip tersebut di DPRD Kabupaten Tulungagung.

Sesuai dengan pernyataan Abdul Halim (2012) yang menjelaskan bahwa perencanaan anggaran yang efektif memerlukan proses yang sistematis dan berbasis data empiris. Hasil analisis data kuesioner dengan rata-rata 4,8 pada aspek proses yang matang dan validitas data mengkonfirmasi implementasi prinsip tersebut. Tidak adanya respons negative (Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju) serta konsistensi rata-rata di atas 4,79 menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran di DPRD Kabupaten Tulungagung telah memenuhi standar yang sangat baik. Hal ini mengindikasikan penerapan tata Kelola pemerintahan yang baik dalam aspek perencanaan anggaran daerah selama kegiatan reses.

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pengawasan Anggaran (X2)

Hasil deskripsi analisis menunjukkan bahwa fungsi pengawasan anggaran di DPRD Kabupaten Tulungagung telah dijalankan dengan sangat baik, sebagaimana terlihat dari rata-rata keseluruhan item yang mencapai rata-rata 4,78 dan tidak adanya respons negative dari seluruh responden. Dominasi respons positif ini mengkonfirmasi bahwa implementasi prinsip-prinsip pengawasan

yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah oleh DPRD Kabupaten Tulungagung terutama pada saat reses. Temuan ini sejalan dengan konsep pengawasan legislative yang dikemukakan oleh Syaukani et al. (2019) yang menekankan bahwa DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal melalui mekanisme yang ketat, sistematis, dan berkelanjutan. Tingginya nilai aspek pengawasan dana reses (5,07) mengkonfirmasi teori Mardiasmo (2020) tentang pentingnya pengawasan khusus terhadap pos-pos anggaran yang rentan terhadap penyalahgunaan, karena dana reses merupakan salah satu komponen yang memerlukan pengawasan ekstra ketat.

Abdul Halim dan Kusufi (2024) menegaskan bahwa pengawasan anggaran yang efektif harus didukung oleh mekanisme evaluasi yang jelas dan system sanksi yang tegas. Hasil penelitian dengan rata-rata 4,8 pada kedua aspek tersebut menunjukkan bahwa DPRD KabTulungagung telah mengimplementasikan *framework* pengawasan yang komprehensif. Adanya mekanisme evaluasi yang jelas memberikan dasar objektif untuk menilai kinerja penggunaan anggaran, sementara system sanksi yang tegas berfungsi sebagai *deterrent effect* terhadap potensi penyimpangan. Namun demikian, adanya rata-rata yang relative lebih rendah pada aspek pengawasan berkala dan transparan (4,6) mengindikasikan ruang perbaikan dalam hal keterbukaan informasi dan konsepsi jadwal pengawasan. Bastian (2020) menekankan bahwa transparansi merupakan pilar utama dalam *good governance*, dan pengawasan yang tidak transparan dapat mengurangi efektivitas fungsi control legislative. Dari keseluruhan hasil penelitian pada aspek Pengawasan Anggaran selama reses, DPRD Kabupaten Tulungagung telah menjalankan fungsi pengawasan anggaran dengan baik, dengan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan yang komprehensif meliputi aspek preventif (mekanisme evaluasi), represif (system sanksi), dan berkelanjutan (pengawasan berkala). Meskipun demikian, peningkatan pada aspek transparansi dan konsistensi pengawasan berkala masih diperlukan untuk mencapai standar pengawasan anggaran yang optimal

sesuai dengan tuntutan tata Kelola pemerintahan yang baik.

Tanggapan Responden terhadap Variabel Efisiensi Penggunaan Anggaran (X3)

Hasil analisis terhadap efisiensi penggunaan anggaran di DPRD Kabupaten Tulungagung di masa reses telah mencapai standar yang sangat baik dengan rata-rata keseluruhan mencapai 4,81, yang mengindikasikan implementasi prinsip *value for money* dalam pengelolaan dana public. Dominasi respons positif dari keseluruhan responden tanpa adanya persepsi negative mengkonfirmasi bahwa praktik pengelolaan anggaran telah sejalan dengan prinsip-prinsip efisiensi dalam administrasi publik. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Mardiasmo (2019) mengemukakan konsep efisiensi anggaran yang menekankan penggunaannya harus memenuhi prinsip ekonomis, efisien, dan efektif (3E). Tingginya nilai pada aspek dampak kegiatan bagi masyarakat (5,07) mengkonfirmasi penerapan prinsip efektivitas, di mana setiap pengeluaran anggaran harus memberikan outcome yang optimal bagi kepentingan publik. Temuan ini mendukung teori *New Public Management* yang dikemukakan oleh Hood (1991) tentang pentingnya orientasi hasil dalam pengelolaan sektor publik.

Hasil penelitian dengan rata-rata 4,8 pada aspek penekanan biaya tidak melulu menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Tulungagung telah menerapkan prinsip ekonomis dalam pengelolaan anggarannya. Hal tersebut dikonfirmasi akan adanya nilai tertinggi pada aspek efektivitas dana reses (4,86) yang mengindikasikan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai telah melalui proses evaluasi dampak yang ketat, sesuai konsep *performance-based budgeting* yang ditekankan oleh OCED (2017).

Tanggapan Responden akan Keterlibatan Masyarakat (X4)

Hasil analisis menunjukkan bahwa keterlibatan Masyarakat dalam pengelolaan anggaran di DPRD Kabupaten Tulungagung telah mencapai standar yang sangat baik dengan rata-rata keseluruhan 4,78, yang mengindikasikan adanya implementasi prinsip partisipatif dalam tata Kelola pemerintahan

daerah. Dominasi respons positif dari seluruh responden tanpa adanya persepsi negative mengkonfirmasi bahwa praktik keterlibatan Masyarakat telah sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi *deliberative* dan *good governance* kontemporer.

Menurut Cahyono dan Indartuti (2022), partisipasi merupakan salah satu prinsip utama *good governance* di mana warga negara memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan Keputusan. Tingginya nilai pada aspek keterlibatan Masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi (4,86) mengonfirmasi penerapan prinsip *deliberative democracy* yang menekankan pentingnya dialog dan musyawarah dalam proses kebijakan publik. Hasil penelitian pada aspek keterbukaan terhadap masukan Masyarakat (4,8) menunjukkan bahwa DPRD telah melakukan prinsip *responsive governance*, di mana instansi public tidak hanya mendengarkan tetapi juga merespon aspirasi Masyarakat secara konstruktif. Namun adanya nilai rata-rata yang relative lebih rendah (4,66) mengindikasikan adanya gap dalam implementasi prinsip *transparency* dan *public education*. Dalam era digital dan tuntutan akuntabilitas yang semakin tinggi, fungsi edukasi dan komunikasi public menjadi semakin krusial. Penelitian-penelitian terbaru dalam bidang *public administration* menekankan bahwa *informed participation* lebih efektif daripada sekedar *formal participation*. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang proses anggaran akan memberikan kontribusi yang lebih berkualitas dalam proses partisipasi.

Tanggapan Responden akan Transparansi Pengelolaan Anggaran (X5)

Dari hasil analisis per item menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan anggaran di DPRD Kabupaten Tulungagung telah mencapai standar yang baik dengan rata-rata keseluruhan 4,74, yang mengindikasikan implementasi prinsip keterbukaan informasi dalam tata Kelola keuangan daerah. Dominasi respons positif dari seluruh responden tanpa adanya persepsi negative mengkonfirmasi bahwa praktik transparansi telah sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* kontemporer, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang optimalisasi lebih lanjut.

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Mediator Peningkatan Aspirasi Masyarakat (M1)

Hasil analisis menunjukkan Tingkat kepuasan Masyarakat yang tinggi terhadap peran DPRD Kabupaten Tulungagung dalam penyerapan aspirasi, dengan rata-rata keseluruhan 4,78 dari skala maksimal. Temuan ini sejalan dengan temuan Kholik Idris dan Supot Rattanapun (2024) yang hasil penelitian menekankan pentingnya optimalisasi fungsi representasi DPRD dalam era demokrasi lokal. Efektifitas reses sebagai mekanisme penyerapan aspirasi menunjukkan keberhasilan reses bergantung pada perencanaan yang matang, keterlibatan aktif Masyarakat, dokumentasi yang baik, dan tindak lanjut yang konsisten yang ditunjukkan persepsi Masyarakat Tulungagung terhadap dana reses yang mencapai skor tertinggi (4,86), mengindikasikan bahwa alokasi dan penggunaan dana reses telah sesuai dengan harapan Masyarakat.

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Mediator Kualitas Laporan dan Dokumentasi Anggaran (M2)

Kesimpulan dari hasil analisis tiap item memberikan gambaran bahwa kualitas laporan dan dokumentasi anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rata-rata total 4,79 dari skala maksimal 5,0. Temuan ini sejalan dengan tren peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara nasional. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa item evaluasi mekanisme DPRD memperoleh skor terendah 4,73, yang mengindikasikan perlunya penguatan system pengawasan internal. Hal ini relevan dengan temuan BPK yang menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme evaluasi dan pengawasan internal menjadi aspek krusial untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan serta akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan standar tata Kelola pemerintah yang baik.

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Mediator Keputusan Berbasis Data (M3)

Secara keseluruhan implementasi Keputusan berbasis data di DPRD Kabupaten Tulungagung menunjukkan kinerja yang baik dengan rata-rata total 4,73 dari skala maksimal 5,0. Namun, terdapat variasi yang cukup signifikan antar item, dengan system informasi mendapatkan skor terendah 4,66 dan evaluasi objektif dana reses mendapatkan skor tertinggi 4,8. Temuan ini sejalan dengan pentingnya monitoring dan evaluasi (Monev) yang efektif dalam pemerintahan (LPKN, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Tulungagung telah menerapkan prinsip-prinsip evaluasi objektif dengan baik, terutama dalam penggunaan dana reses. Namun aspek system informasi yang mendapat skor terendah mengindikasikan perlunya investasi lebih lanjut dalam infrastruktur teknologi informasi.

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kinerja DPRD Kabupaten Tulungagung dalam Penggunaan Dana Reses (Y)

Dari hasil kinerja DPRD Kabupaten Tulungagung dalam penggunaan dana reses menunjukkan hasil yang baik dengan rata-rata total 4,79 dari skala maksimal 5,0. Adanya variasi signifikan antar item, yakni manfaat yang nyata bagi Masyarakat memperoleh skor terendah 4,73, dan profesionalisme pengelolaan mendapatkan skor tertinggi 4,86. Temuan ini sejalan dengan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana reses berupa integritas tinggi, ketrampilan komunikasi yang baik, dan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan publik (Idris dan Rattanapun, 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Tulungagung telah menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme dengan baik, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek dampak nyata bagi Masyarakat.

Hal ini relevan dengan konsep akuntabilitas yang dikemukakan oleh Purnomo (2016) yang menekankan persepsi users atas akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Lebih lanjut, Maihendro et al. (2020) dalam analisis profesionalisme anggota DPRD

menegaskan pentingnya menjalankan tugas pokok dan fungsi secara optimal. Skor yang relative tinggi pada aspek profesionalisme dan akuntabilitas (4,86 dan 4,8) menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Tulungagung telah menjalankan prinsip-prinsip *good governance* dengan sangat baik.

c. Hasil Analisis Statistik

1) Uji Instrumen Penelitian

Hasil Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Sig.	Keterangan
Kualitas Perencanaan Anggaran (X ₁)	X _{1,1}	0,890	0,514	0,001	Valid
	X _{1,2}	0,932	0,514	0,001	Valid
	X _{1,3}	0,882	0,514	0,001	Valid
	X _{1,4}	0,890	0,514	0,001	Valid
Pengawasan Anggaran (X ₂)	X _{2,1}	0,789	0,514	0,001	Valid
	X _{2,2}	0,687	0,514	0,005	Valid
	X _{2,3}	0,942	0,514	0,001	Valid
	X _{2,4}	0,828	0,514	0,001	Valid
Efisiensi Anggaran (X ₃)	X _{3,1}	0,862	0,514	0,001	Valid
	X _{3,2}	0,523	0,514	0,046	Valid
	X _{3,3}	0,862	0,514	0,001	Valid
	X _{3,4}	0,922	0,514	0,001	Valid
Keterlibatan Masyarakat (X ₄)	X _{4,1}	0,760	0,514	0,001	Valid
	X _{4,2}	0,907	0,514	0,001	Valid
	X _{4,3}	0,784	0,514	0,001	Valid
	X _{4,4}	0,901	0,514	0,001	Valid
Transparansi Penggunaan Anggaran (X ₅)	X _{5,1}	0,573	0,514	0,026	Valid
	X _{5,2}	0,760	0,514	0,001	Valid
	X _{5,3}	0,859	0,514	0,001	Valid
	X _{5,4}	0,886	0,514	0,001	Valid
Peningkatan Aspirasi Masyarakat (M ₁)	M _{1,1}	0,846	0,514	0,001	Valid
	M _{1,2}	0,963	0,514	0,001	Valid
	M _{1,3}	0,884	0,514	0,001	Valid
	M _{1,4}	0,884	0,514	0,001	Valid
Kualitas Laporan dan Dokumentasi Anggaran (M ₂)	M _{2,1}	0,770	0,514	0,001	Valid
	M _{2,2}	0,921	0,514	0,001	Valid
	M _{2,3}	0,964	0,514	0,001	Valid
	M _{2,4}	0,799	0,514	0,001	Valid
Keputusan Berbasis Data (M ₃)	M _{3,1}	0,935	0,514	0,001	Valid
	M _{3,2}	0,828	0,514	0,001	Valid
	M _{3,3}	0,961	0,514	0,001	Valid
	M _{3,4}	0,839	0,514	0,001	Valid
Kinerja DPRD (Y)	Y ₁	0,935	0,514	0,001	Valid
	Y ₂	0,828	0,514	0,001	Valid
	Y ₃	0,961	0,514	0,001	Valid
	Y ₄	0,839	0,514	0,001	Valid

Sumber: Data diolah 2025

Berdasarkan Tabel, yang menampilkan hasil uji validitas instrumen penelitian, dapat dilihat bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner telah memenuhi kriteria validitas yang dipersyaratkan. Tabel ini mengevaluasi validitas dari enam variabel utama penelitian, yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran (X₁), Pengawasan Anggaran (X₂), Efisiensi Anggaran (X₃), Keterlibatan Masyarakat (X₄), Transparansi Penggunaan Anggaran (X₅), Peningkatan Aspirasi Masyarakat (M₁), Kualitas Laporan dan Dokumentasi Anggaran (M₂), Keputusan Berbasis Data (M₃), dan Kinerja DPRD (Y). Hasil pengujian

menunjukkan bahwa semua item memiliki nilai r-hitung yang lebih besar dari r-tabel (0,514), dengan rentang nilai r-hitung berkisar antara 0,523 hingga 0,964. Nilai signifikansi (Sig.) untuk semua item menunjukkan angka di bawah 0,05, dengan sebagian besar item memiliki nilai signifikansi 0,001, yang mengindikasikan tingkat validitas yang sangat tinggi.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Kualitas Perencanaan Anggaran (X ₁)	0,918	Reliabel
2	Pengawasan Anggaran (X ₂)	0,822	Reliabel
3	Efisiensi Anggaran (X ₃)	0,816	Reliabel
4	Keterlibatan Masyarakat (X ₄)	0,859	Reliabel
5	Transparansi Penggunaan Anggaran (X ₅)	0,766	Reliabel
6	Peningkatan Aspirasi Masyarakat (M ₁)	0,913	Reliabel
7	Kualitas Laporan dan Dokumentasi Anggaran (M ₂)	0,889	Reliabel
8	Keputusan Berbasis Data (M ₃)	0,915	Reliabel
9	Kinerja DPRD (Y)	0,915	Reliabel

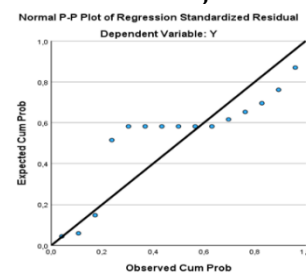
Sumber: Data diolah 2025

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan terhadap sembilan variabel penelitian, dapat dilihat bahwa seluruh instrumen penelitian menunjukkan tingkat reliabilitas yang sangat baik. Pengujian reliabilitas menggunakan metode Cronbach's Alpha menghasilkan nilai yang berkisar antara 0,766 hingga 0,918, dimana seluruh nilai tersebut berada di atas batas minimum yang dipersyaratkan yaitu 0,60. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian yang terdiri dari sembilan variabel telah memiliki Tingkat keandalan dan konsistensi internal yang sangat baik. Dengan nilai Cronbach's Alpha yang berkisar antara 0,766-0,918, seluruh variabel dinyatakan reliabel dan layak digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

2) Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Gambar 6 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data diolah 2025

Grafik P-Plot di atas memberikan gambaran bahwa titik-titik menyebar cukup dekat dan mengikuti garis diagonal. Garis diagonal merupakan garis harapan distribusi normal, sedangkan titik-titik biru menggambarkan distribusi kumulatif actual dari residual standar. Semakin dekat titik-titik biru menggambarkan distribusi kumulatif actual dari residual standar. Semakin dekat titik-titik tersebut terhadap garis, maka semakin normal distribusi residualnya.

Tabel 4 Uji Normalitas

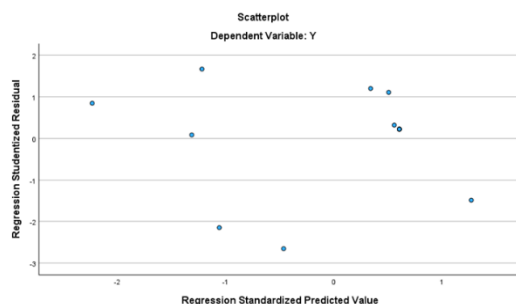
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			,00000
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,633866
	Std. Deviation		,3
Most Extreme Differences	Absolute		,1
	Positive		-,3
	Negative		-,3
Test Statistic			,3
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			<,0
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		<,0
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,0
		Upper Bound	,0
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.			

Sumber: Data diolah 2025

Jika merujuk pada histogram dan P-P Plot grafik sebelumnya yang menunjukkan distribusi residual menyerupai kurva normal, maka dapat dikatakan bahwa secara visual residual masih dapat dianggap normal. Sehingga dapat disimpulkan meskipun uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil signifikan (Sig.< 0,001) hasil histogram memperlihatkan pola mendekati distribusi normal. Maka dari itu, dengan mempertimbangkan ukuran sampel kecil, residual dalam model regresi ini masih dapat dinilai cukup memenuhi asumsi normalitas secara praktis, sesuai pendapat Gujarati dan Porter (2019).

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah 2025

Pada grafik di atas, titik-titik residual tersebar tidak membentuk pola tertentu (seperti pola kipas, melengkung, atau menyempit).

Penyebaran titik terlihat acak, baik di atas maupun di bawah sumbu nol. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ghozali (2018) Dalam grafik ini, jika titik-titik residual menyebar secara acak di sekitar garis horizontal dan tidak membentuk pola tertentu maka disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas, sehingga dapat dilanjutkan pada tahap analisis selanjutnya.

Hasil Uji Multikolonearitas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolonearitis

		Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	-2,063	4,168			-,495	,632		
	X1	,799	,327	,725	2,440	,037		,192	5,216
	X2	-,993	,507	-,829	-1,958	,082		,094	10,584
	X3	,039	,335	,031	,115	,911		,228	4,390
	X4	1,180	,558	1,023	2,117	,063		,072	13,800
	X5	,070	,344	,059	,203	,844		,204	4,913

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah 2025

Dari tabel di atas dapat menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF<10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonearitas pada masing-masing variabel.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 2,063 + 0,799 (X1) + 0,993 (X2) + 0,039 (X3) + 1,023 (X4) + 0,70 (X5) + \epsilon$$

1. Nilai konstanta sebesar -2,063 menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen bernilai nol, maka nilai kinerja DPRD (Y) diprediksi sebesar -2,063. Namun, karena secara praktis semua variabel bebas tidak mungkin bernilai nol, konstanta hanya berfungsi sebagai penyesuaian matematis dalam model.
2. Variabel Kualitas Perencanaan Anggaran (X1) menunjukkan koefisien B senilai 0,799, artinya setiap peningkatan 1 satuan dalam kualitas perencanaan anggaran akan meningkatkan kinerja DPRD sebesar 0,799 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Signifikansi $0,037 < 0,05$ menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik. Beta (standar) 0,725 adalah salah satu yang tertinggi menandakan kontribusi

besar terhadap perubahan variabel Y (Kinerja DPRD dalam masa reses). Dapat disimpulkan bahwa kualitas perencanaan yang matang secara signifikan mendorong kinerja DPRD dalam menggunakan anggaran reses secara lebih efektif dan efisien.

3. Variabel Pengawasan Anggaran (X2) memiliki koefisien B $-0,993$ artinya peningkatan pengawasan justru memiliki pengaruh negative terhadap variabel (Y) akan tetapi nilai signifikansi $0,082 > 0,05$ menunjukkan tidak signifikan pada Tingkat kepercayaan 95%. Nilai Beta $-0,829$ mengindikasikan pengawasan yang terlalu ketat atau birokrasi justru menurunkan fleksibilitas dalam menjalankan reses. Memberikan pengertian bahwa pengawasan diperlukan, tetapi jika terlalu ketat atau tidak proporsional dapat memicu hambatan dalam pelaksanaan kegiatan reses.
4. Variabel Efisiensi Penggunaan Anggaran (X3) memiliki koefisien B senilai $0,039$ sangat kecil sehingga tidak memiliki pengaruh yang nyata, dengan nilai Signifikansi $0,911 > 0,05$ yang berarti tidak signifikan secara statistic, nilai Beta $0,031$ yang berarti kontribusi sangat rendah. Dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran belum menjadi factor utamayang mempengaruhi kinerja DPRD Kabupaten Tulungagung, dapat disebabkan karena indikator efisiensi belum terukur secara objektif dalam praktiknya.
5. Variabel Keterlibatan Masyarakat (X4) memiliki nilai Koefisien B tertinggi yakni $1,180$, dengan nilai Signifikansi $0,063$ yang mendekati signifikan pada 10% *confidence level*. Nilai Beta tertinggi dari semua variabel senilai $1,023$. Hal ini memiliki kesimpulan bahwa keterlibatan Masyarakat sangat potensial dalam meningkatkan kinerja DPRD saat masa reses, meskipun belum signifikan pada taraf 5%. Berarti bahwa, Perlu penguatan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
6. Variabel Transparansi Pengelolaan Anggaran (X5) memiliki nilai koefisien B senilai $0,070$ dengan nilai Signifikan $0,844$

berarti tidak memiliki signifikan dengan Beta senilai $0,059$ yang artinya kontribusi rendah. Dari nilai tersebut dapat dijelaskan bahwa transparansi belum memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Tulungagung. Hal ini dapat diartikan bahwa keterbukaan informasi belum menjadi perhatian utama atau belum dimanfaatkan secara optimal oleh Masyarakat.

3) Uji Hipotesis

Hasil Uji F (Uji Simultan)

Tabel 6 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	31,308	5	6,262	10,019	,002 ^b
	Residual	5,625	9	,625		
	Total	36,933	14			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X5, X1, X3, X2, X4

Sumber: Data diolah 2025

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil bahwa F hitung = 10,019 dengan nilai Signifikasi (Sig.) sebesar 0,002. Karena nilai signifikasi ($0,002 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibangun signifikan secara statistic pada taraf kepercayaan 95%, artinya secara simultan seluruh variabel independent yang terdiri atas; Kualitas Perencanaan Anggaran (X1), Pengawasan Anggaran (X2), Efisiensi Penggunaan Anggaran (X3), Keterlibatan Masyarakat (X4) serta Transparansi Pengelolaan Anggaran (X5) secara Bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yakni Kinerja DPRD (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kinerja DPRD Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan reses dipengaruhi oleh semua faktor yang menjadi kombinasi keseluruhan variabel-variabel anggaran yang digunakan selama masa reses.

Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Tabel 7 Uji Parsial

Variabel	t Hitung	Sig.
X1 (Kualitas Perencanaan Anggaran)	-1,690	0,125
X2 (Pengawasan Anggaran)	-1,213	0,256
X3 (Efisiensi Penggunaan Anggaran)	0,231	0,822
X4 (Keterlibatan Masyarakat)	2,056	0,070
X5 (Transparansi Pengelolaan Anggaran)	-1,791	0,107

Sumber: Data diolah 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa tidak terdapat variabel independent yang berpengaruh secara signifikan pada Tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) terhadap variabel

dependen, yaitu Kinerja DPRD (Y). Namun, terdapat temuan yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut, khususnya pada variabel Keterlibatan Masyarakat (X4).

4) Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.921 ^a	.848	.763	.79057	.828
a. Predictors: (Constant), X5, X1, X3, X2, X4					
b. Dependent Variable: Y					

Sumber: Data diolah 2025

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang telah disajikan pada Tabel 4.20, diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (R) adalah 0,921 atau mendekati 1, artinya terdapat hubungan yang searah antara; Kualitas Perencanaan Anggaran (X1), Pengawasan Anggaran (X2), Efisiensi Penggunaan Anggaran (X3), Keterlibatan Masyarakat (X4) serta Transparansi Pengelolaan Anggaran (X5) dengan Kinerja DPRD (Y). Hal ini berarti jika kualitas perencanaan anggaran, pengawasan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, keterlibatan Masyarakat, serta transparansi pengelolaan anggaran ditingkatkan, maka kinerja DPRD juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya. Nilai R Square (R^2) sebesar 0,848 menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki daya yang sangat kuat, karena lebih dari 80% perubahan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Hal ini selaras dengan pendapat Sugiyono (2023), apabila nilai R^2 berada di atas 0,75 maka model regresi dapat dikategorikan kuat dan layak digunakan dalam prediksi analisis kebijakan. Dalam konteks ini, artinya pengelolaan anggaran yang mencakup dari aspek perencanaan, pengawasan, efisiensi, partisipasi Masyarakat, dan transparansi pengelolaannya memiliki pengaruh nyata dan substansial terhadap keberhasilan Kinerja DPRD Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan fungsinya dalam masa reses. Adapun nilai Adjusted R Square sebesar 0,763 memperkuat Kesimpulan bahwa variabel ini tidak hanya kuat secara statistic, tetapi juga efisien dan relevan dalam konteks penelitian.

5) Pembahasan dan Hasil Penelitian

a. Kualitas Perencanaan Anggaran (X1) terhadap Kinerja DPRD (Y)

Temuan penelitian ini menunjukkan bukti empiris yang kuat mengenai hubungan positif antara Kualitas Perencanaan Anggaran terhadap Kinerja DPRD. Hal ini menjawab permasalahan penelitian yang berkaitan dengan bagaimana dan apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD dalam masa Reses. Sebagaimana dari hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Kualitas Perencanaan Anggaran (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja DPRD dengan koefisien regresi sebesar 0,799 dengan Tingkat signifikansi $0,037 < 0,05$. Hasil mengindikasikan bahwa peningkatan satu unit dalam kualitas perencanaan anggaran akan meningkatkan kinerja DPRD sebesar 79,9%, ini merupakan suatu temuan yang sangat substantif dalam konteks tata Kelola pemerintah daerah. Hubungan positif ini dapat dijelaskan melalui mekanisme bahwa perencanaan anggaran yang berkualitas memberikan dasar yang solid bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal tersebut sesuai dengan temuan penelitian oleh Siregar dan Nasution (2023), yang menyatakan bahwa kualitas perencanaan yang baik juga memungkinkan DPRD untuk mengalokasikan sumberdaya secara lebih efisien dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

b. Pengawasan Anggaran (X2) terhadap Kinerja DPRD (Y)

Temuan penelitian terhadap variabel Pengawasan Anggaran (X2) berpengaruh negative namun tidak signifikan terhadap kinerja DPRD dengan koefisien β sebesar -0,993 dan nilai signifikansi $0,082 > 0,05$ yang mengindikasikan adanya paradoks dalam implementasi fungsi pengawasan. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun pengawasan anggaran merupakan salah satu fungsi utama DPRD yang diamanatkan secara konstitusional secara keseluruhan. Fenomena tersebut dapat dijelaskan akibat dari kurangnya tindak lanjut dari hasil pengawasan, dimana temuan-temuan audit atau evaluasi anggaran belum diikuti dengan rekomendasi implementatif yang terukur. Selain hal itu, temuan ini juga memberikan indikasi bahwa

kapasitas anggota DPRD dalam melakukan pengawasan yang komprehensif masih terbatas, baik dari aspek teknis maupun metodologis, sehingga pengawasan yang dilakukan cenderung bersifat formalitas dan masih kurang mendalam (Pratama dan Wijaya, 2024).

c. Efisiensi Penggunaan Anggaran (X3) terhadap Kinerja DPRD (Y)

Variabel Efisiensi Penggunaan Anggaran (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,822 > 0,05$, yang menjelaskan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan terhadap kinerja DPRD. Artinya, efisiensi belum menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program-program DPRD, termasuk kegiatan reses. DPRD lebih terfokus pada fungsi representasi dan legislasi, sehingga efisiensi penggunaan anggaran belum menjadi indikator utama dalam pengukuran kinerja DPRD. Selain itu variabel efisiensi penggunaan anggaran juga memiliki koefisien sebesar 0,039 dan nilai signifikansi 0,911, hal ini menjelaskan bahwa efisiensi dalam penggunaan anggaran belum menjadi variabel penentu dalam peningkatan kinerja DPRD. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh efisiensi sulit diukur secara langsung dalam konteks Lembaga legislatif yang tidak terfokus pada pelaksanaan program melainkan pada pengawasan dan perencanaan. Selain itu belum adanya indikator pengukuran efisiensi yang baku pada kegiatan DPRD juga menjadi penyebab lemahnya kontribusi variabel ini. Efisiensi lebih banyak terasosiasi dengan lembaga eksekutif yang melaksanakan kegiatan secara langsung.

d. Keterlibatan Masyarakat (X4) terhadap Kinerja DPRD (Y)

Variabel Keterlibatan Masyarakat (X4) memiliki koefisien sebesar 1,180 dan signifikansi 0,063, menunjukkan adanya pengaruh positif yang mendekati signifikan terhadap Kinerja DPRD. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mulai memberikan kontribusi penting dalam mendorong kinerja DPRD ke arah yang lebih baik. Kehadiran masyarakat dalam forum reses, musrenbang, dan konsultasi publik menjadi saluran penting dalam menjembatani aspirasi dengan kebijakan. Ketika masyarakat terlibat aktif, DPRD terdorong untuk lebih

akuntabel dan responsif dalam menetapkan prioritas program daerah. Partisipasi publik juga menjadi sarana evaluatif terhadap kinerja DPRD secara langsung.

e. Transparansi Pengelolaan Anggaran (X5) terhadap Kinerja DPRD (Y)

Transparansi Pengelolaan Anggaran (X5) menunjukkan nilai signifikansi 0,844 dan koefisien $0,070 > 0,05$, menandakan pengaruhnya terhadap Kinerja DPRD tidak signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun transparansi merupakan prinsip penting dalam tata kelola keuangan publik, pada konteks ini belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja DPRD. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya pemanfaatan informasi anggaran oleh masyarakat atau kurangnya strategi komunikasi DPRD dalam menyampaikan informasi. Jika transparansi tidak disertai dengan aksesibilitas dan pemahaman masyarakat, maka fungsinya menjadi tidak optimal. Selain itu, keterbukaan informasi yang hanya bersifat formal tidak cukup untuk menumbuhkan kepercayaan publik. Transparansi anggaran memerlukan pendekatan yang komunikatif dan edukatif agar dapat dimanfaatkan secara efektif oleh warga (Salsabila dan Nugroho, 2022). Oleh karena itu, DPRD perlu mengembangkan sistem informasi yang mudah diakses dan menyajikan data yang relevan dan terstruktur. Transparansi yang aktif dan partisipatif dapat meningkatkan legitimasi dan mendorong kinerja lembaga legislatif. Namun dalam penelitian ini, peran transparansi belum terlihat nyata sebagai penggerak utama kinerja DPRD. Kesimpulannya, transparansi pengelolaan anggaran belum menjadi faktor dominan dalam memengaruhi kinerja DPRD secara signifikan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, analisa, dan pembahasan yang sudah dijabarkan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kualitas Perencanaan Anggaran memiliki pengaruh yang kurang signifikan terhadap Kinerja DPRD Kabupaten Tulungagung. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun perencanaan telah dilakukan, dalam

praktiknya belum sepenuhnya efektif dalam mendorong kinerja DPRD secara keseluruhan. Rendahnya pengaruh tersebut dapat disebabkan oleh belum adanya kesesuaian antara rencana dan kebutuhan Masyarakat serta kurangnya implementasi perencanaan di lapangan.

- b. Pengawasan Anggaran belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja DPRD Kabupaten Tulungagung Hal ini memiliki indikasi bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD belum optimal dalam mendorong peningkatan kinerja selama masa rese, atau dalam pelaksanaannya belum cukup kuat untuk menghasilkan efek langsung terhadap pencapaian target kegiatan reses.
- c. Efisiensi Penggunaan Anggaran juga belum memiliki nilai yang signifikan terhadap Kinerja DPRD Kabupaten Tulungagung selama reses. Hal ini memiliki arti bahwa efisiensi belum menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan anggaran selama masa reses, atau dapat juga diakibatkan oleh keterbatasan data dan ukuran efisiensi anggaran yang digunakan.
- d. Keterlibatan Masyarakat memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja DPRD Kabupaten Tulungagung. Artinya, semakin tinggi partisipasi Masyarakat dalam proses reses, semakin besar peningkatan kinerja DPRD. Temuan ini sejalan dengan teori partisipatif yang menekankan pentingnya pelibatan Masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan public (Cohen dan Uphoff, 2022).
- e. Transparansi Pengelolaan Anggaran menunjukkan pengaruh negative yang tidak signifikan terhadap kinerja DPRD. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya transparansi, belum cukup kuat untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kinerja DPRD.
- f. Secara simultan, seluruh variabel independent berpengaruh signifikan terhadap Kinerja DPRD dengan nilai signifikansi 0,002 dan nilai F sebesar 10,019. Model regresi ini menjelaskan sebesar 84,8% variabel kinerja DPRD (R^2

= 0,848). Hal ini sesuai dengan pendapat Ghazali (2023) yang menyatakan bahwa meskipun pengaruh variabel secara parsial tidak selalu signifikan, secara simultan model dapat memberikan kontribusi bermakna terhadap variabel dependen.

Saran

Berdasarkan hasil temuan dan Kesimpulan penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1) Kepada DPRD Kabupaten Tulungagung:

- a. Perlu mendorong keterlibatan Masyarakat secara lebih intensif dan substansial dalam proses reses, baik dalam bentuk diskusi terbuka, forum aspirasi, maupun kolaborasi perencanaan kegiatan.
- b. Melakukan evaluasi terhadap mekanisme transparansi anggaran khususnya pada kegiatan reses agar Masyarakat dapat mengakses dan memahami peruntukan secara lebih jelas dan terarah.

2) Kepada Pemerintah Daerah

Mendorong sinergi antara Lembaga eksekutif dan legislatif dalam hal pengawasan dan perencanaan reses, sehingga kegiatan ini tidak hanya bersifat formalitas, namun dapat berdampak nyata pada Pembangunan daerah.

3) Peneliti Lanjutan

- a. Disarankan bagi peneliti berikutnya untuk memperluas cakupan variabel atau menggunakan pendekatan campuran (mixed-method), sebagai pelengkap sehingga mendapatkan pemahaman lebih mendalam seperti persepsi Masyarakat dan sikap politis kinerja DPRD pada masa reses.
- b. Menambahkan variabel lainnya seperti komunikasi publik, persepsi Masyarakat terhadap DPRD, atau kualitas pertanggungjawaban hasil reses, untuk memperluas cakupan variabel.

Referensi

- Aida, N., Husaini, M., Fajar, M., Rahman, N. (2022). *Peran Sekretariat DPRD Dalam Mendampingi Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Tabalong*.
- Alessandro Nedi, J. A., Masu, R. R., Kosmas, E., & Ratu Udju, H. (2023). *Kajian Yuridis Terhadap Asas Transparansi Penggunaan*

- Dana Reses Anggota DPRD Kota Kupang Periode 2019-2023. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(6), 704–714. <https://doi.org/10.59141/jist.V4i6.630>
- Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Studi Kinerja Dprd Kabupaten Tulang Bawang Periode Tahun 2009-20014). (2021).
- Ananda, S., Aris Munandar, M., & Benny Mukti Setiawan, W. (2024). Unnes Political Science Journal Recess Analysis as An Aggregation of Interests. *Unnes Political Science Journal*, 8(1), 44–49. <https://doi.org/10.15294/upsj.V8i1.78016>
- Anselah, Suman, Ekonomi, F., Islam, B., & Kendari, I. (2023). Analisis Belanja Pegawai Dan Belanja Operasional Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan DPRD Kabupaten Konawe Utara. <https://doi.org/10.37010/jdc.V1i2>
- Apriansyah, A., Supriadi, D., & Aulia, M. D. (2023a). Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Sumbawa Dalam Mengawasi Pelaksanaan Apbd Tahun Anggaran 2020 (Vol. 6, Issue 7). <http://iip.stkipyapisdampu.ac.id>
- Beriansyah, A., & Mutiarin, D. (2015). Analisis Hasil Reses DPRD Dalam Penyusunan Dan Penetapan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014. *Journal Of Governance And Public Policy*, 2(2). <https://doi.org/10.18196/jgpp.2015.0038>
- Dewi, A. K., & Wira Bharata, R. (2021). Halaman 5 (Vol. 9). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/Edukasi>
- Dilla, I. U., Nasution, M. A., & Suriadi, A. (2022). Efektivitas Program Reses DPRD Kota Medan Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Medan Labuhan. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 6(4). <https://doi.org/10.56015/Governance.V6i4.61>
- Doli, O., Mulia, T., Panjaitan, R., & Waruwu, P. (2020). Peran Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat Dalam Peningkatan Kinerja Dprd Kabupaten Nias Barat. In *Jurnal Prointegrita* (Vol. 4, Issue 1).
- Erlinda, Rina. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses DPRD. *Jurnal Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis. Universitas Brawijaya*.
- Fattah, I. (2018). Mendorong Reses Paripatip Masuk Dalam Tata Tertib DPRD Kota Parepare. In *Desember* (Vol. 2, Issue 2).
- Hamidin, N., Mustafa, L. O., Ode, W., & Ramayana, S. (2023). Peran Reses DPRD Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat: Studi Di Lakudo, Buton Tengah.
- Hidayatullah, H., & Pribadi, U. (2016a). Analisis Jaring Aspirasi Melalui Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur Tahun 2015. *Journal Of Governance And Public Policy*, 3(2), 339–367. <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0062>
- Hidayatullah, H., & Pribadi, U. (2016b). Analisis Jaring Aspirasi Melalui Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur Tahun 2015. *Journal Of Governance And Public Policy*, 3(2), 339–367. <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0062>
- Holilah, H., & Ismail, M. (2023). Model Komunikasi Reses Anggota DPRD Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Bangkalan. *Indonesian Journal Of Political Studies (Ijps)*, 3(2), 150–175. <https://doi.org/10.15642/ijps.2023.3.2.150-175>
- Jusman, Rahman, A., Mahsyar, A., & Nasrullah. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pembangunan Desa Di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. *Buletin Poltanesa*, 23(2). <https://doi.org/10.51967/Tanesa.V23i2.1980>
- Kausari, R. W., Meutia, R., & Fachruddin, R. (2022). Analisis Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(4), 679–687. <https://doi.org/10.24815/jimeka.V7i4.22459>
- Krisniawati, K. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Aceh Timur. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.32505/Ihtiyath.V5i1.2572>
- Kurniasih, D., & Rusfiana, D. Y. (2023). Fungsi Reses Anggota DPRD Dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung. In *Jurnal Academia Praja* (Vol. 4).
- Maulina, S. A., Agustino, L., Dewi, S. K., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2022). Penjaringan Aspirasi Masyarakat Melalui Reses Anggota DPRD Provinsi Banten (Studi Kasus Pada Masa Persidangan Ke Ii Tahun Sidang 2017/2018). *Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan Apbd Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Indonesia*. (2022).
- Muhammad Faris Rahman (2023) _29.1184_Optimalisasi Kegiatan Reses Anggota DPRD Dalam Menyerap Aspirasi.

- Murnisari, R., Larasati Purbaningrum, N., Tulungagung, U., & Kesuma Negara Blitar, S. (2024). *Journal Of Accounting And Tax*.
- Musliamin, M., Nawawi, D., Rakhmat, R., & Abdullah, M. T. (2020). The Performance Of The Regional People's Representative Council In Implementing The Legislative And Budgeting Functions In Bone Regency. *International Journal Of Multicultural And Multireligious Understanding*, 7(9), 93. <https://doi.org/10.18415/Ijmmu.V7i9.1928>
- Naomi Agnes, P., & Martini, R. (2024) *Analisis Efektivitas Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah Pada Masa*.
- Novita, D. (2023). *Efektifitas Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib Terkait Serap Aspirasi (Reses) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Di Kabupaten Sumenep*.
- Nyoman, I., Badrika, A., & Sulandari, S. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Widya Publika *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Ngurah Rai. Jurnal Widya Publika*, 10(2).
- Pemerintahan, J., & Politik, D. (2022). Collaborative Governance Dalam Masa Reses DPRD Kabupaten Banyuasin. *Januari*, 7(1).
- Piter, R., & Hutaeruk, S. (2021). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Pematangsiantar. *Ekuiilnmi: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 2614–7181. <https://doi.org/10.36985/Ekuilnmi.V3i1.528>
- Pramesti, A., Hidayat, R., Nababan, R., Lia Wardani, P., (2023) Analisis Kinerja Sekretariat Komisi III DPRD Kabupaten Karawang. *Ilmu Sosial dan Humaniora Studi Ilmu Pemerintahan*, P., Singaperbangsa Karawang, U., & Ronggowaluyo Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, J. H. <http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/Muqoddimah>
- Prasetya, R. A., Kus Suparwati, Y., Kristanto, R. S., Bank, S., & Jateng, B. (2022). *Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan)*. Xi. <https://jateng.bpk.go.id/penyerapan->
- Putranto Riau, D., Pengendalian Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Anggaran Studi Evaluasi Pengisian Aplikasi Smart Dan E-Monev Dalam Kinerja Anggaran Di KPU Kab, S., & Jawa Timur, K. (2022). *How To Cite:Monev Dalam Kinerja Anggaran Di Kpu Kab/Kota Jawa Timur*. 7(5). <http://E-Monev.Bappenas.Go.Id>
- Rahman, K. G. (2023). Budget Ratcheting Pada Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah: Studi Kasus Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barru. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 1, Issue 1). <https://E-Jurnal.Nobel.Ac.Id/Index.Php/Imprest>
- Sanjaya, L., Fakhruddin, I., & Dirgantari, N. (2021). Sistem Pengendalian Intern Terhadap Dana Reses Pada Kantor Sekretariat DPRD Banyumas. *Review Of Applied Accounting Research*, 1(1), 37–47. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Raar/>
- Saputri, S. M., Hariyanti, W., & Harjito, Y. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(2), 83. <https://doi.org/10.20473/Baki.V5i2.18332>
- Sari, I. (2017a). Pengaruh Personal Background Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Kinerja DPRD Kota Padang Dalam Pengawasan Keuangan Daerah the Influence of Personal Background and Council Budget Knowledge Toward the Performance of Dprd Padang City on Region Financial Control Keywords Personal Background, Council Budget Knowledge, And Performance of Dprd On Region Financial Control. In *Majalah Sainstekes* (Vol. 4, Issue 2).
- Septalinda, F., S., Supriyono, B., & Suryawati, D. (2023). Participatory Budgeting in Practice: A Case Study of The Banyuwangi District Legislative. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/Kss.V8i17.14132>
- Septariani, J. (2024). Studi Kasus Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (Jiar)*, 7(2), 173–192. <https://jurnal.irs.ac.id/index.php/Ak/>
- Siagian, N., Zagoto, D., Bintang, I., Situmorang, K., Prodi, D., Bisnis Fisipol, A., Medan, U., Dinas, S., Selatan, S. N., & Prodi, M. (2022). Implikasi Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Terhadap Daerah Pemilihan di Kabupaten Nias Selatan. In *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* (Vol. 5). <http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id>
- Supiat2, I. *, & Rahman, A. (2023). Supervisory Function of The Regional People's Representative Council in Managing the Regional Budget in West Sulawesi Province (Ibadurrahman) Supervisory Function of The

- Regional People's Representative Council in Managing the Regional Budget in West Sulawesi Province. *International Journal of Health, Economics, And Social Sciences (Ijhees)*, 5(4), 465–470.
<https://doi.org/10.56338/Ijhees.V5i4.4233>
- Tarigan, W. J., Sinaga, M. H., & Ginting, R. S. (2023). Penggunaan Anggaran Belanja Langsung Dalam Penganggaran Berbasis Kinerja Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 9–20.
<https://doi.org/10.36985/Ekuilnomi.V5i1.490>
- Utha, A., Ode Muhamamd Elwan, L., & Azhar, M. Z. (2023). *Neorespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan Implementasi Hasil Reses Anggota DPRD Kota Baubau Dalam Proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022*. 4(2), 348–362.
<https://doi.org/10.52423/Neores.V4i2.74>
- Wasistiono, S. (2019a). Model Pengukuran Akuntabilitas Kinerja DPRD Dalam Konteks Good Governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(2), 113–126.
<https://doi.org/10.33701/Jipwp.V45i2.787>
- Wulandari, A., Marselina, A., Ismail, N., Studi Akuntansi, P., & Ekonomi, F. (2024). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Modal Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ende. In *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi* (Vol. 5, Issue 1).
- Yasin, *, Saleh, M., & Mulyanto, Y. (2023). *Penggunaan Aplikasi E-Reses DPRD Dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Bima*. <http://jip.stkipyapisdampu.ac.id>